Copyright © The Author(s) 2026
Journal Social Society Vol 6 No 2, April - June 2026

Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2021-2025

Haliza Firdausy Nuzula [1*], Rizky Maya Wulandari [2], Revienda Anita Fitrie [3], Eva Hany Fanida [4]

[1, 2, 3. 4] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674095@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan efisiensi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami fluktuasi, dengan kategori cukup efektif hingga efektif pada tahun 2021–2025, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi kurang efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi secara umum berada dalam kategori efisien selama periode penelitian, meskipun terdapat variasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran belanja daerah di Kabupaten Gresik tergolong cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran agar lebih optimal.

Kata Kunci: *Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja, Keuangan Daerah.*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Tuntutan dalam pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif, serta transparan agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi bagian dari penerapan *good governance* yang menekankan pentingnya akuntabilitas serta transparansi keuangan *public* yang dikelola. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Yuliani & Pratama, 2021; Kurniawan et al., 2023). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi yaitu instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. APBD tidak hanya mencerminkan prioritas kebijakan daerah, tetapi juga menjadi alat pengendalian dalam memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang diterapkan. Dengan demikian, pengelolaan APBD yang efektif akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan taraf hidup publik dan keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan (Putri & Nugroho, 2022; Saputra et al., 2024).

https://doi.org/10.30605/jss.6.2.2026.1336

Penyusunan dan pelaksanaan APBD harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi lain yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesesuaian antara perencanaan anggaran dan regulasi yang berlaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Rahma et al., 2026).

Efektivitas serta efisiensi menjadi indikator terpenting guna penilaian kinerja pengelolaan anggaran daerah. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana anggaran yang digunakan mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien tidak hanya bergantung pada besarnya realisasi anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan efisiensi menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan yang berkinerja tinggi dan berorientasi pada hasil (Hikma et al., 2026)

Anggaran yang tidak digunakan secara efektif dan efisien sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti rendahnya tingkat penyerapan anggaran, adanya kesenjangan (gap) antara tahap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran (Aprilya & Jaenudin, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pembangunan daerah serta menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, ketidakefisienan anggaran juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara berkelanjutan agar program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat

Pengelolaan anggaran daerah tidak selalu berjalan secara optimal. Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada instansi pemerintah dapat berbeda pada setiap organisasi perangkat daerah (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Sementara penelitian lainnya terkait Analisa kinerja keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2017-2025 (Kusuma & Budiwitjaksono, 2023). Berdasarkan penelitian tersebut, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi aspek penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya.

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga hasil pengelolaan keuangan tidak dapat disamaratakan. Perbedaan tersebut menuntut adanya analisis yang lebih spesifik dan kontekstual agar dapat menggambarkan kondisi riil di masing-masing daerah (Sari & Mahendra, 2022; Utami et al., 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2021–2025 guna mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan

daerah secara lebih komprehensif serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang (Pratiwi & Ramadhan, 2024; Nugroho & Saputri, 2021).

Rumusan masalah dalam studi yang dilakukan yaitu bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2021–2025, serta sejauh mana kinerja tersebut mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat realisasi anggaran merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya fluktuasi atau ketidakkonsistenan dalam pengelolaan anggaran yang dapat memengaruhi capaian pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah dalam mendukung pembangunan daerah secara optimal. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik, serta menjadi dasar dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Kebaruan (*novelty)* penelitian ini terletak pada fokus analisis yang bukan hanya menilai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja secara umum, melainkan mengkaji dinamika kinerja keuangan daerah dalam rentang waktu terbaru (2021–2025) yang mencakup periode pemulihan pascapandemi dan transisi kebijakan fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengaitkan tingkat realisasi anggaran dengan stabilitas kinerja antar tahun, sehingga mampu mengidentifikasi pola fluktuasi yang memengaruhi perubahan efektivitas dan efisiensi anggaran. Dengan objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang memiliki karakteristik fiskal dan prioritas pembangunan tersendiri, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan dalam mendeskripsikan sebuah permasalahan atau fenomena dengan menggunakan perhitungan berupa angka. Objek dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik periode anggaran 2021-2025. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu sumber data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui pihak lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2021 hingga 2025 yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa lembar dokumentasi dan format tabulasi data yang digunakan untuk mencatat serta mengolah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2021–2025, yang meliputi komponen target anggaran, realisasi anggaran, serta perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan secara resmi, sedangkan sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu laporan keuangan periode tahun anggaran 2021 hingga 2025 yang tersedia secara lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengunduh dan mengumpulkan data dari *website* resmi Pemerintah Kabupaten Gresik, kemudian data tersebut diklasifikasikan, dicatat, dan dianalisis untuk mendukung proses penelitian secara kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik tertentu dari suatu objek melalui proses interpretasi, pengolahan, dan pengumpulan data sehingga dapat disajikan dalam bentuk visualisasi yang menggambarkan kondisi yang diteliti berdasarkan data numerik.

Penetapan Rasio Efektivitas

Salah satu standar yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk menilai apakah tujuan yang dijadwalkan atau ditargetkan dapat tercapai atau tidak adalah tingkat pengukuran efektivitas. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 menguraikan lima kriteria untuk mengukur efektivitas, yaitu sebagai berikut: 1. Perhitungan sangat efektif jika hasilnya 100%. 2. Hasil perhitungan dapat diklasifikasikan sebagai efektif jika berada antara 90% dan 100%. 3. Hasil perhitungan dapat diklasifikasikan sebagai sangat efektif jika berada antara 80% dan 90%. 4. Dapat diklasifikasikan sebagai kurang berhasil jika hasil perhitungan berada antara 60% dan 80%. 5. Perhitungan dapat dianggap tidak berguna jika hasilnya kurang dari 60%.

Penetapan Rasio Efisiensi

Dengan membandingkan tingkat realisasi pengeluaran langsung dengan realisasi anggaran, dapat ditentukan efisiensi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, terdapat lima faktor yang digunakan untuk mengukur efisiensi, yaitu sebagai berikut: 1. Perhitungan dianggap tidak efisien jika hasil persentasenya lebih tinggi dari 100%. 2. Perhitungan dianggap kurang efisien jika hasilnya berada antara 90% dan 100%. 3. Perhitungan dapat diklasifikasikan sebagai sangat efisien jika hasilnya berada antara 80% dan 90%. 4. Perhitungan dapat diklasifikasikan sebagai efisien jika hasilnya berada antara 60% dan 80%. 5. Perhitungan dapat diklasifikasikan sebagai sangat efisien jika hasilnya kurang dari 60%.

Hasil

Tabel 1. *Data APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025*

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2021	3.597.937.590.465,00	3.192.751.693.289,33
2022	3.940.289.380.229,00	3.554.078.352.827,67
2023	3.940.289.380.229,00	3.418.637.234.689,96
2024	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23
2025	3.809.501.438.593,60	1.665.909.477.729,23

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat dari tahun 2021 hingga 2024 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2025. Realisasi belanja setiap tahunnya selalu berada di bawah anggaran yang ditetapkan, namun tetap menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi pada periode 2021–2024. Pada tahun 2025, realisasi belanja terlihat jauh lebih rendah dibandingkan anggaran, yang kemungkinan disebabkan oleh tahun anggaran yang masih berjalan atau belum sepenuhnya terealisasi. Secara umum, data ini mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi di setiap tahunnya.

Tabel 2. *Efektivitas Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2025*

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2021	3.597.937.590.465,00	3.192.751.693.289,33	88,73%	Cukup Efektif
2022	3.940.289.380.229,00	3.554.078.352.827,67	90,19%	Efektif
2023	3.940.289.380.229,00	3.418.637.234.689,96	86,76%	Cukup efektif
2024	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	93,02%	Efektif
2025	3.809.501.438.593,60	1.665.909.477.729,23	43,73%	Kurang Efektif

Berdasarkan tabel 2. Diketahui bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas belanja daerah yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas mencapai 88,73% dengan kategori cukup efektif. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 90,19% dan masuk dalam kategori efektif. Namun, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 86,76% sehingga dikategorikan cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi 93,02% dan kembali berada pada kategori efektif sebagai tingkat efektivitas tertinggi selama periode tersebut. Tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 43,73% dengan kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup besar antara anggaran belanja dan realisasinya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja efektivitas belanja daerah tergolong baik pada periode 2021–2024 karena berada di atas 85%, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tabel 3. *Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021-2025*

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2021	3.192.751.693.289,33	2.763.841.487.572,00	86,56%	Cukup Efisien
2022	3.554.078.352.827,67	2.646.209.845.419,67	74,45%	Efisien
2023	3.418.637.234.689,96	2.646.209.845.419,67	69,36%	Efisien
2024	3.697.575.974.929,23	2.919.824.641.465,85	78,96%	Efisien
2025	1.665.909.477.729,23	1.212.107.768.972,23	72,75%	Efisien

Berdasarkan tabel 3 tersebut, tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2021–2025 menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan berada dalam kategori efisien. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang sebagian besar berada di bawah 80%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara cukup hemat dan terkontrol. Pada tahun 2021, tingkat efisiensi mencapai 86,56% dengan kategori cukup efisien, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 74,45% dan tahun 2023 sebesar 69,36%, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Efisiensi meningkat menjadi 78,96% pada tahun 2024, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 72,75%. Meskipun terjadi fluktuasi, seluruh tahun (kecuali 2021) tetap berada dalam kategori efisien. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan persentase terendah sebesar 69,36%, sedangkan tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 86,56%. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah mampu mengelola belanja daerah secara efisien, meskipun masih terdapat variasi yang perlu diperhatikan terutama dalam menjaga konsistensi efisiensi di setiap tahunnya.

Pembahasan

Kewenangan yang diberikan untuk secara bebas membuat dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah membangun otonomi daerah. Dengan memaksimalkan kapasitasnya, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PPN), pemerintah daerah berupaya mengawasi dan mengelola urusan daerah. Investigasi terhadap sumber-sumber

pendapatan ini sangat penting untuk menjaga kemandirian ekonomi daerah yang kuat dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan mampu membiayai belanja daerah secara lebih optimal sehingga dapat meminimalkan potensi defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemanfaatan belanja daerah yang tepat sasaran dan efisien akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, maupun program-program kesejahteraan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

Analisis tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja daerah pada periode tahun 2021–2025 berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 88,73% atau tergolong cukup efektif, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 3.192.751.693.289,33 dari anggaran Rp 3.597.937.590.465,00. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas mengalami peningkatan menjadi 90,19% dan tergolong efektif, dimana anggaran belanja sebesar Rp 3.940.289.380.229,00 dengan realisasi Rp 3.554.078.352.827,67.

Tahun 2023 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 86,76% atau tergolong cukup efektif, dengan anggaran yang relatif sama yaitu Rp 3.940.289.380.229,00 namun realisasinya menurun menjadi Rp 3.418.637.234.689,96. Pada tahun 2024 tingkat efektivitas kembali meningkat menjadi 93,02% atau tergolong efektif, dengan anggaran sebesar Rp 3.974.761.570.922,00 dan realisasi Rp 3.697.575.974.929,23. Akan tetapi, pada tahun 2025 tingkat efektivitas mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 43,73% atau tergolong kurang efektif, dimana anggaran belanja sebesar Rp 3.809.501.438.593,60 namun realisasinya hanya Rp 1.665.909.477.729,23.

Hasil analisis tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja daerah tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada periode 2021–2025 masih berada di atas 85% sehingga dapat dikatakan cukup efektif hingga efektif, meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan drastis yang menyebabkan kinerja menjadi kurang efektif. Secara keseluruhan, hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya stabil, sehingga perlu adanya peningkatan dalam perencanaan dan realisasi anggaran agar lebih optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Temuan dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai studi empiris terbaru yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran di atas 85% umumnya dikategorikan sebagai cukup efektif hingga efektif, namun belum tentu mencerminkan stabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tingginya realisasi anggaran sering kali masih diiringi dengan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, sehingga kinerja keuangan daerah belum optimal. Selain itu, fluktuasi realisasi anggaran dari tahun ke tahun merupakan fenomena yang umum terjadi dan dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan pembangunan serta kapasitas pengelolaan fiskal daerah (Habibi et al., 2024; Rinaldi et al., 2024).

Penurunan signifikan pada tahun tertentu, seperti yang terjadi pada tahun 2025 dalam penelitian ini, juga sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat realisasi dan kinerja keuangan daerah. Di sisi lain, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari kualitas perencanaan,

konsistensi pelaksanaan, serta pencapaian output program yang diharapkan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini semakin menegaskan bahwa meskipun tingkat efektivitas realisasi anggaran tergolong tinggi, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi agar pengelolaan belanja daerah menjadi lebih stabil dan optimal (Puspitasari et al., 2024; Hotimah & Fattah, 2024; Hadisutisna, 2024).

Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Pemerintah Kabupaten Gresik biasanya memiliki kriteria efisien untuk anggaran lima tahunan, berdasarkan analisis tingkat efisiensi dalam realisasi pengeluaran langsung tahun anggaran 2021–2025 menggunakan perhitungan rasio efisiensi. Dengan realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp 3.192.751.693.289,33 dan realisasi pengeluaran langsung sebesar Rp 2.763.841.487.572,00 pada tahun 2021, tingkat efisiensinya adalah 86,56%. Dengan realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp 3.554.078.352.827,67 dan realisasi pengeluaran langsung sebesar Rp 2.646.209.845.419,67 pada tahun 2022, tingkat efisiensinya adalah 74,45%.

Tahun 2023 tingkat efisiensi sebesar 69,36%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 3.418.637.234.689,96 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.646.209.845.419,67. Pada tahun 2024 tingkat efisiensi sebesar 78,96%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 3.697.575.974.929,23 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.919.824.641.465,85. Sedangkan pada tahun 2025 tingkat efisiensi sebesar 72,75%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.665.909.477.729,23 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 1.212.107.768.972,23.

Belanja langsung yang dilakukan selama lima tahun periode anggaran menunjukkan persentase rata-rata sebesar 76,42% sehingga dapat dikategorikan efisien karena berada pada kisaran di bawah 90%. Temuan dengan studi terdahulu yang mengemukakan jika efisiensi belanja daerah tercermin dari kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dan merealisasikan anggaran secara proporsional tanpa menimbulkan pemborosan, namun tetap mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, efisiensi juga dipengaruhi oleh kualitas penganggaran berbasis kinerja yang menuntut keterkaitan antara input, output, dan outcome program secara jelas (Sari & Putra, 2021; Wibowo et al., 2022).

Tingkat efisiensi yang telah dicapai masih memerlukan peningkatan dari sisi konsistensi antarperiode. Fluktuasi yang terjadi dalam realisasi belanja langsung menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas perencanaan dan implementasi anggaran. Penelitian lain mengungkapkan bahwa efisiensi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat, evaluasi kinerja yang berkesinambungan, serta sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah agar efisiensi tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal setiap tahunnya (Lestari et al., 2023; Firmansyah & Dewi, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran berada pada kategori cukup efektif, sedangkan efisiensi pengeluaran langsung menunjukkan kategori efisien. Hasil tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan target dan kebutuhan pembangunan daerah. Efektivitas anggaran yang tercapai menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sementara tingkat efisiensi yang baik mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara hemat dan optimal tanpa mengurangi pencapaian tujuan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Gresik dinilai mampu mengelola anggaran daerah secara lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2021–2025 tergolong efektif dan efisien, diperlukan penguatan dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi anggaran agar kinerja keuangan lebih stabil dan optimal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang terbatas pada laporan keuangan, sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam aspek kualitas output dan dampak belanja terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, analisis yang digunakan masih bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta menambahkan variabel kinerja program dan dampak pembangunan agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas dan efisiensi anggaran daerah.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Aprilya, R., & Jaenudin, E. (2026). Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Kapasitas Fiskal Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel Intervening . *Journal Social Society*, 6(2), 1257–1269. https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1241

Firmansyah, I., & Dewi, R. S. (2024). Pengaruh pengendalian internal terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 55–68. https://doi.org/10.24843/JAP.2024.v10.i01.p05

Habibi, H., Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–489. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75

Hadisutisna, S. (2024). Menakar akuntabilitas fiskal pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Analisis dokumen realisasi anggaran tahun 2021–2023. *Aspirasi*, 15(2). https://doi.org/10.31943/aspirasi.v15i2.140

Hikmah, M. N., Mahdani, R., & Syafrizal, S. (2026). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya). *Journal Social Society*, 6(2), 915–927. https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1145

Hotimah, K., & Fattah, V. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja operasi dan belanja modal daerah Kota Palu. *Journal of Economics and Management Scienties*, 7(4). https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207

Kurniawan, D., Hidayati, N., & Siregar, M. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 77–90. https://doi.org/10.31289/jakp.v8i2.6891

Kusuma, R. H., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Journal of Management and Bussines (JOMB),* 5(2), 1704–1711. https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6115

Lestari, N., Handayani, S., & Prakoso, A. (2023). Evaluasi efisiensi belanja daerah berbasis kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 24(2), 134–147. https://doi.org/10.21002/jepi.2023.08

Nugroho, A., & Saputri, D. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah berbasis efektivitas dan efisiensi anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 23–37. https://doi.org/10.31289/jakp.v6i1.5123

Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis realisasi anggaran belanja dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang periode 2015–2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 11(1), 1–10. https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639

Pratiwi, N. L., & Ramadhan, F. (2024). Evaluasi efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam mendukung pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 16(1), 55–68. https://doi.org/10.20885/jepd.vol16.iss1.art5

Puspitasari, D., Rachmawaty, R., & Sahroni, S. (2024). Analisis perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pencapaian realisasi anggaran*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1). https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6649

Putri, A. R., & Nugroho, B. (2022). Analisis efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–68. https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2750

Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281

Rinaldi, R., Hasibuan, A. P., Lubis, P. K. D., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis efektivitas realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Medan tahun 2021–2023*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 278–288. https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.605

Saputra, R., Firmansyah, I., & Lestari, D. (2024). Determinan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis APBD. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 101–115. https://doi.org/10.30641/jian.v12i1.8123

Sari, D. P., & Putra, R. A. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja daerah dalam perspektif value for money. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 45–58. https://doi.org/10.20961/jiep.v21i1.51789

Sari, R. K., & Mahendra, A. (2022). Pengaruh kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 9(2), 101–115. https://doi.org/10.31092/jkpi.v9i2.678

Utami, D. P., Wibowo, H., & Lestari, S. (2023). Perencanaan anggaran dan implikasinya terhadap efektivitas belanja daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 77–90. https://doi.org/10.21776/ub.jap.2023.013.01.6

Wibowo, A., Nugraha, H., & Santoso, B. (2022). Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–115. https://doi.org/10.21776/ub.jap.2022.012.02.3

Yuliani, S., & Pratama, A. (2021). Good governance dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jurnal *Administrasi Publik Indonesia*, 7(3), 210–223. https://doi.org/10.31506/japi.v7i3.10245